



KORAN	HAL
Haluan	6
Padang Ekspres	
Singgaling	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

DPRD Sumbar Desak OPD Tuntaskan Temuan BPK

PADANG, HALUAN- Komisi III DPRD Sumbar meminta beberapa OPD di lingkungan Pemprov Sumbar segera menyelesaikan kelebihan bayar yang menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Ketua Komisi III Ali Tanjung mengatakan pihaknya telah melaksanakan rapat kerja pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Tahun 2021 bersama mitra kerja OPD terkait, di Batusangkar, Minggu (19/6).

"Dalam kesempatan itu, kami menekankan tentang LHP BPK. Ditemukan ada kelebihan bayar honorarium PA dan KPA di lingkungan Pemda Sumbar," katanya, Senin (20/6).

Setelah dimintai pendapat dari OPD terkait, hal itu terjadi lantaran kesalahpahaman dalam memahami aturan. Ia mengatakan, antara Pemprov dan BPK berbeda cara penafsiran antara aturan yang berlaku.

"Meskipun begitu, kami tidak mentolerir hal demikian, kami minta segera diselesaikan, jangan sampai menjadikan temuan bagi BPK di

kemudian hari. Batas waktu yang diberikan BPK itu 60 hari. dinas yang menjadi mitra Komisi III menyanggupi hal itu," katanya.

Pemprov atau OPD terkait, katanya, juga perlu segera meminta pendapat dari Kemendagri dan BPK untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak jadi temuan. Selain itu, pihaknya juga meminta tidak lagi terjadi keterlambatan bayar bagi proyek yang sudah selesai dikerjakan.

"Mengenai kelebihan bayar itu angkanya memang tidak besar, tapi kami minta Pemprov tertib administrasi, tertib aturan. Kami juga meminta tidak lagi ada pembayaran yang terlambat, sebab kemari banyak pekerjaan yang sudah selesai, tapi pembayarannya belum dilunasi," katanya.

Keterlambatan bayar itu, katanya, akan membuat rugi rekanan. Sebab itu, ia meminta agar Pemprov dan OPD terkait tertib administrasi dan aturan.

"Jangan ada lagi keterlambatan bayar, ini merugikan pengusaha atau rekanan yang baru membaik setelah pandemi. Untuk Biro Barang dan Jasa agar segera melakukan pelelangan proyek, agar anggaran cepat terserap dan ekonomi masyarakat dapat pulih dan membaik," katanya. (rga)